



LAPORAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPIK) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2017-2037



KERJASAMA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Usulan : Penelitian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
(RPIK)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan

2. Ketua

- a. Nama lengkap : Dr. Hairudinor, S.Sos.,M.M
- b. Jabatan Struktural : Pembina / IVa
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Unit kerja : FISIP Universitas Lambung Mangkurat
- e. Alamat surat : Jalan Brigiend H. Hasan Basry Kotak Pos 87 Banjarmasin
- f. Telpon/Faks : 0511-3308021
- g. E-mail : hairudin.fisipulm@gmail.com

3. Anggota peneliti

No.	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi
1.	Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH.,M.Hum	Administrasi Bisnis	Universitas Lambung Mangkurat
2.	Kausar Natsir, S.IP	Ilmu Pemerintahan	Universitas Lambung Mangkurat
3.	Nurmaya Safitri, SH	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
4.	Wahyu Irfan, S.Pd	FKIP	Universitas Lambung Mangkurat

4. Sumber Dana : Dana APBD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

5. Biaya Penelitian : Rp 76.000.000,00

Banjarmasin, Desember 2017

Ketua

Mengetahui,
A.n. Ketua LPPM UNLAM
Sekretaris

Dr. Abdul Halim Barkatullah S.H., M. Hum
NIP. 19761109 200604 1 003

Dr. Hairudinor, S.Sos.,M.M
NIP. 197306 199903 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	4
1.2.1. Maksud dan Tujuan.....	4
1.2.2. Dasar Hukum.....	4
1.3. Sistematika Pelaporan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	8
2.1. Kondisi Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	8
2.1.1. Letak Geografis.....	8
2.1.2. Demografi	12
2.1.3. Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	13
2.2. Perkembangan Ekonomi Daerah	32
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan	32
2.2.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	33
2.2.3. PDRB Per Kapita	34
2.3. Sektor Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	36
2.3.1. Analisis LQ	36
2.3.2. Analisis Shift Share.....	46
2.3.3. Summary Analisis Sektoral.....	52
2.4. Infrastruktur Dasar dan Penataan Wilayah	53
2.4.1. Infrastruktur Jalan Darat	54
2.4.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	54
2.4.3. Potensi hambatan dan masalah dalam pembangunan industri	62
BAB III VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	65
3.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan	65
3.1.1. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	65
3.1.2. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	73
3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	74
3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	75
3.4. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan	77
BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	Error!
Bookmark not defined.	

- 4.1. Strategi Pembangunan Industri **Error! Bookmark not defined.**
 - 4.1.1. Strategi Pembangunan Industri **Error! Bookmark not defined.**
 - 4.1.2. Strategi Pengembangan Sentra Industri **Error! Bookmark not defined.**
 - 4.1.3. Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kecil **Error! Bookmark not defined.**
- 4.2. Program Pembangunan Industri..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 4.2.1. Program Pengembangan Industri Unggulan Kab. Hulu Sungai Selatan **Error! Bookmark not defined.**
 - 4.2.2. Program Pembangunan Industri Hulu Agro..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 4.2.3. Program Pembangunan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan **Error! Bookmark not defined.**
 - 4.2.4. Program Pembangunan Industri Barang Logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik **Error! Bookmark not defined.**
 - 4.2.5. Pengembangan Perwilayahan Industri **Error! Bookmark not defined.**
 - 4.2.6. Pembangunan Sumber Daya Industri. **Error! Bookmark not defined.**
 - 4.2.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri ... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP..... **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	8
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2016.....	12
Tabel 2.3.	Lapangan Pekerjaan	13
Tabel 2.4.	Pertumbuhan PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2016.....	32
Tabel 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2016	32
Tabel 2.6.	Struktur PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2011-2015.....	33
Tabel 2.7.	PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012—2016.....	35
Tabel 2.8.	Perhitungan besaran nilai LQ per sektor Hulu Sungai Selatan untuk tahun 2012 sampai dengan 2016.....	38
Tabel 2.9.	Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012-2016	39
Tabel 2.10.	Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012-2016.....	40
Tabel 2.11.	Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan Per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	41
Tabel 2.12.	Hasil Perhitungan Model LQ Produksi Sayuran Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	42
Tabel 2.13.	Hasil Perhitungan Model LQ Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	43
Tabel 2.14.	Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	44
Tabel 2.15.	Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Peternakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	44
Tabel 2.16.	Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	45
Tabel 2.17.	Shift Share Sektor Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2011-2015	48
Tabel 2.18.	Analisis Model Shift-Share Pendekatan Proportional Shift (PS) dan Differential Shift (DS) Kab. Hulu Sungai Selatan.....	51
Tabel 2.19.	Infrastruktur Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2016	54
Tabel. 2.20.	Fungsi Dan tujuan SSWP Kabupaten Hulu Sungai Selatan	58
Tabel 3.1.	Perumusan Visi	72

Tabel 3.2.	Keterkaitan Visi Pembangunan Industri Nasional, Provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	72
Tabel 3.3.	Sinkronisasi Rancangan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Misi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan	73
Tabel 3.4.	Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 - 2035	75
Tabel 4.1.	Faktor-faktor yang Menentukan Industri Unggulan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2.	Industri Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3	Program Pengembangan Industri Hulu Agro Tahun 2017 – 2037	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.4.	Program Pengembangan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Tahun 2017-2037	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.5.	Program Pengembangan Industri Barang Logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik Tahun 2017-2037 .	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.6.	Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2017 – 2037	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.7.	Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2017 – 2037	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.8.	Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2017 – 2037	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.9.	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.10.	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.11.	Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2017 – 2037	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.12.	Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2017 – 2037	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.13.	Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2017 – 2037	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.14.	Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2017 – 2037	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.15.	Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2017 – 2037	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.16.	Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2017 – 2037	Error! Bookmark not defined.

- Tabel 4.17 Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2017 – 2037**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.18. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Tahun 2017 – 2037**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.19. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2017 – 2037**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	1
Gambar 2.1. Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	11
Gambar 2.2. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu sungai Selatan.....	31
Gambar 2.3. Long List Komoditas Industri Unggulan	Error! Bookmark not defined.

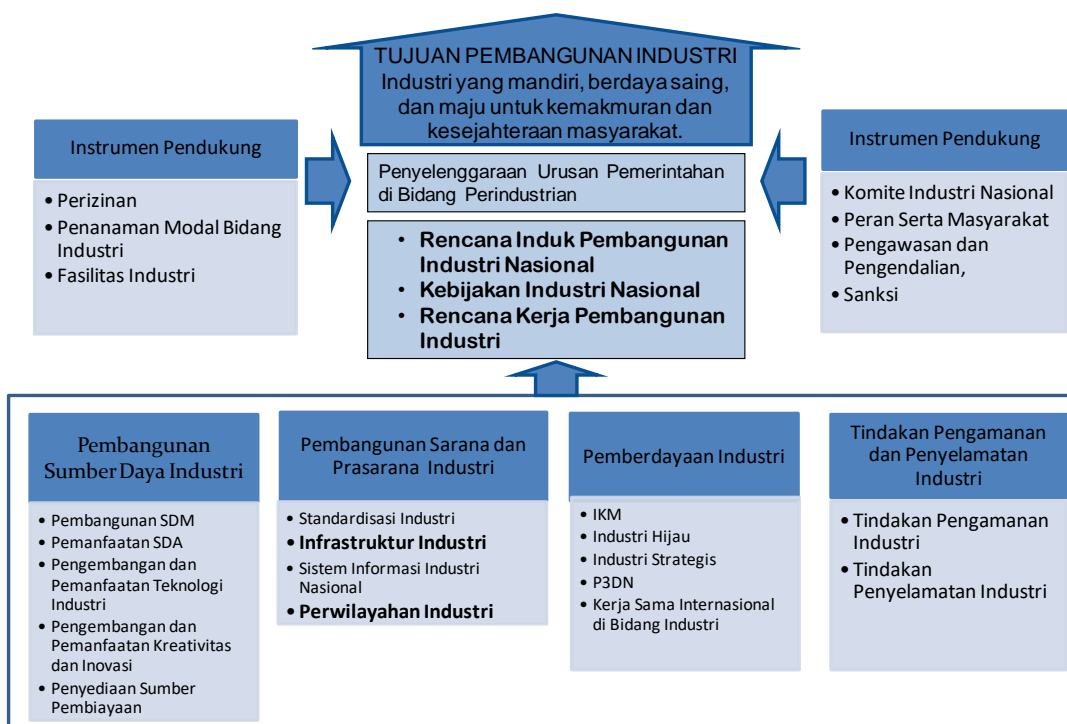
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pada pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Rencana itu selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kab/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur.

Secara umum skema UU No. 3 tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Sumber: Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri, 2014

Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota disusun paling sedikit memperhatikan:

- Potensi sumber daya Industri daerah:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota;
- Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

RPIK merupakan prioritas dari Walikota/Bupati di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten/kota terkait melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD. Rancangan RPIK/K disusun oleh Bupati/Walikota, sedangkan rancangan Renstra-SKPD disusun oleh pimpinan masing-masing SKPD Kabupaten/kota. Rancangan RPIK/K ditelaah oleh Gubernur untuk melihat konsistensi RPIK/K dengan RPIP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIK/K dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Pewilayahan Industri Kementerian Perindustrian memberikan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Industri untuk daerah-daerah di Kalimantan, termasuk didalamnya Provinsi Kalimantan Selatan. Penerima manfaat kegiatan ini adalah *stakeholder* di provinsi di Wilayah Kalimantan Selatan antara lain Pemerintah

Daerah, pelaku industri, dan juga masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terstruktur dan terarah. Penerima manfaat tersebut akan dapat tercakup secara keseluruhan ketika Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan terwujud dan diimplementasikan.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2037 mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 serta Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Daerah pada Tahun 2035 dan visi nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2037 sebagai suatu rencana strategis untuk menempatkan perindustrian yang tangguh sebagai *core business* suatu daerah diharapkan dapat menata pemanfaatan sentra industri yang terencana dengan baik, lebih terarah dan lebih optimal akan menciptakan sistem perindustrian yang lebih produktif, aman dan berkelanjutan.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Maksud dan Tujuan

Mengacu pada Pedoman Penyusunan RPIK yang telah ditentukan, maka maksud dan tujuan disusunnya Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu :

1. Salah satu dasar pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meningkatkan daya saing industry daerah.
2. Menjadi salah satu masukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Menjadi salah satu masukan dalam penyusunan dan perubahan RKPd.

1.2.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 9 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015-2035
3. UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 10 tentang rencana induk pembangunan industri daerah
4. UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 11 tentang rencana pembangunan industri kabupaten.

1.3. Sistematika Pelaporan

Sistematika RPIK Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016 - 2035 mengacu pada PERMENPERIN (Draf 10) Panduan RPIP/RPIK tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum.
 - C. Sistematika Penulisan.
- II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - A. Kondisi Daerah
 - B. Sumber Daya Industri
 - C. Sarana dan Prasarana
 - D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
- III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah.
 - B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penentuan industri unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri,

pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industry

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program – program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri

5. Pemberdayaan Industri

Program – program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 20 tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1. KONDISI UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2.1.1. Letak Geografis

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak diantara $02^{\circ}29'58''\text{LS}$ - $02^{\circ}56'10''\text{LS}$ dan $114^{\circ}51'19''\text{BT}$ - $115^{\circ}36'19''\text{BT}$. Sedangkan ibukotanya yaitu Kecamatan Kandangan terletak $2^{\circ}47'\text{LS}$ dan $115^{\circ}40'\text{BT}$ yang dilewati oleh Sungai Amandit, anak sungai dari Sungai Barito. Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 kecamatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara

Sebelah timur : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru

Sebelah selatan : Kabupaten Tapin

Sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tapin

Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam tiap-tiap kecamatan terlihat pada tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1. Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota	Luas (Km ²)	Desa/ Kelurahan
1	Padang Batung	Padang Batung	203,93	17
2	Loksado	Loksado	338,89	11
3	Telaga Langsat	Telaga Langsat	58,08	11
4	Angkinang	Angkinang	58,40	11
5	Kandangan	Kandangan	106,71	18
6	Sungai Raya	Sungai Raya	80,96	18
7	Simpur	Simpur	82,35	11
8	Kalumpang	Kalumpang	135,07	9

9	Daha Selatan	Tumbukan Banyu	322,80	16
10	Daha Utara	Tambak Bitin	268,11	19
11	Daha Barat	Bajayau	149,62	7
Jumlah			1804,92	148

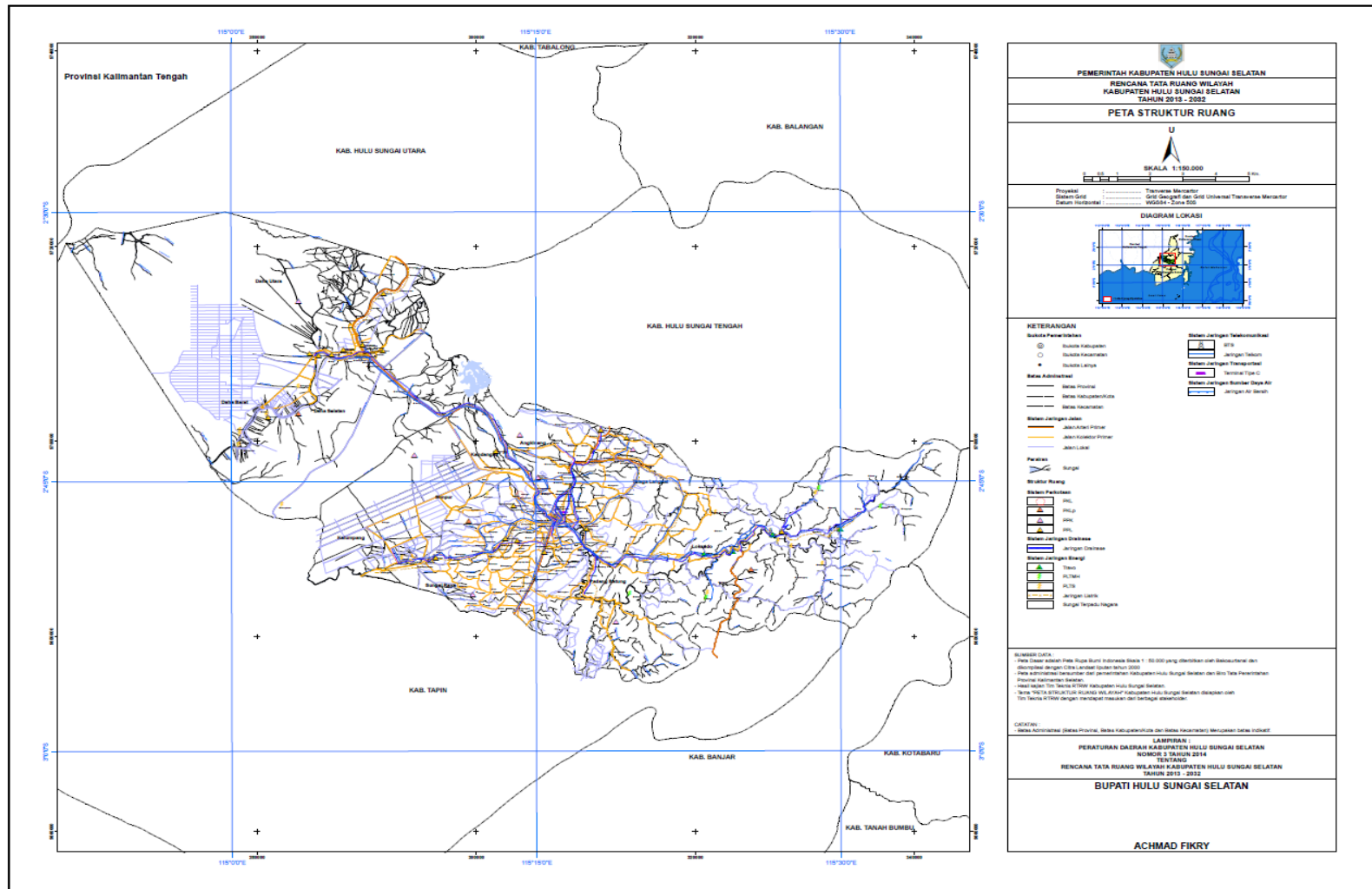
Sumber: BPS Kab HSS, 2017

Secara geologis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang terkadang berawa-rawa (rawa menoton), sehingga udaranya terasa dingin dan agak lembab. Salah satu faktor tanah yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembangunan adalah faktor ketinggian tempat dan kemiringan wilayah.

Klasifikasi ketinggian dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelas, yang seolah-olah terbagi dua, yaitu wilayah sebelah barat berupa dataran rendah dengan kondisi medan umumnya datar, sedangkan wilayah sebelah timur medannya bervariasi. Daerah dengan ketinggian 0-25 meter atau relatif datar seluruhnya terdapat dibagian barat. Secara keseluruhan, daerah relatif datar ini luasnya mencapai 123.452 Ha atau \pm 68% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Daerah dengan ketinggian di atas 25 meter dimulai dari wilayah Kecamatan Padang Batung, Telaga Langsat, Angkinang, dan Sungai Raya mengarah kesebelah timur. Wilayah yang paling luas adalah wilayah dengan klasifikasi ketinggian antara 0 sampai 7 meter, dengan persentase mencapai 58,3%. Sedangkan wilayah ketinggian yang paling sempit adalah wilayah dengan klasifikasi ketinggian di atas 1000 meter dengan persentase 0,9% yang hanya terdapat di Kecamatan Loksado.

Wilayah sebelahbarat didominasi oleh daerah genangan (rawa) atau persawahan. Daerah ini meliputi Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat, dan sedikit wilayah Kecamatan Kalumpang dan Angkinang. Sedangkan wilayah sebelah timur terutama Kecamatan Loksado umumnya berupa hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman keras (tahunan).



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.1.2. Demografi

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 229.889 jiwa yang terdiri atas 114.892 jiwa penduduk laki-laki dan 114.997 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,20% dan angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,91.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016 mencapai 127 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kandangan dengan kepadatan sebesar 471 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Loksado sebesar 26 jiwa/km².

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
1	Padang Batung	19.510	20.847	21.092	1,30	1,17
2	Loksado	8.202	8.839	8.968	1,49	1,45
3	Telaga Langsat	8.996	9.619	9.750	1,34	1,35
4	Angkinang	16.765	17.718	17.905	1,10	1,05
5	Kandangan	46.744	49.737	50.293	1,22	1,11
6	Sungai Raya	16.439	17.379	17.558	1,10	1,02
7	Simpur	13.947	14.550	14.668	0,84	0,81
8	Kalumpang	6.064	6.309	6.357	0,79	0,76
9	Daha Selatan	39.149	41.939	42.498	1,37	1,32
10	Daha Barat	7.203	7.799	7.915	1,57	1,48
11	Daha Utara	30.095	32.417	32.885	1,48	1,43
Jumlah		213.114	227.153	229.889	1,26	1,20

Sumber: BPS Kab HSS, 2017

Selanjutnya dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka diperlukan lapangan kerja baru untuk menampung jumlah penduduk tersebut. Berikut peningkatan Lapangan pekerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016. Peningkatan Lapangan pekerjaan secara umum belum cukup mampu memenuhi semua sector dikarenakan masih ada sector yang dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.3. Lapangan Pekerjaan

No	Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin (%)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	43,66	35,12	40,16
2	Pertambangan dan Penggalian	2,53	0,00	1,49
3	Industri Pengolahan	10,02	9,66	9,87
4	Listrik, Gas, dan Air	0,00	0,00	0,00
5	Bangunan	6,66	0,00	3,93
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	17,65	34,26	24,47
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	3,37	0,00	1,99
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Perumahan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	1,54	1,51	1,52
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	14,58	19,45	16,58
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab HSS, 2017

Berdasarkan data diatas, peningkatan lapangan pekerjaan secara umum belum cukup mampu memenuhi semua sector dikarenakan masih ada sector yang dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.1.3. Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya

RTRW kabupaten/kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Terdiri dari rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya (tabel 2.3 Pola Ruang dan Peta 2.1 Pola Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Hulu Sungai Selatan)

Berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang dimaksud dengan Kawasan Lindung adalah suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi serta pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan. Maka tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya, dan kawasan lindung meliputi kawasan suaka alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Arahan pengelolaan dalam upaya melestarikan kawasan lindung secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan lindung.
- b. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- c. Pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung.
- d. Percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayunya.

- e. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam.
- f. Pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam.
- g. Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi kawasan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung.

Pada bagian ini perlu dijelaskan tentang jenis kawasan lindung disertai dengan lokasi dan luasan sejauh memungkinkan. Dalam mengendalikan kegiatan alih fungsi kawasan lindung, ataupun tidak terjadi alih fungsi tetapi sudah mengalami penurunan fungsi, perlu dirumuskan upaya pengembalian dan pelestarian fungsi lindung sesuai dengan kepentingan fungsi masing-masing.

Jenis kawasan lindung di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan lindung
 - Kec. Loksado 19.955 Ha
 - Kec. Padang Batung 3.059 Ha
 - Kec. Telaga Langsat 904 Ha
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya
 - Kec. Loksado luasnya 7.490 Ha
 - Kec. Padang Batung luasnya 750 Ha
 - Kec. Telaga Langsat luasnya 250 Ha
3. Kawasan perlindungan setempat
 - Danau Bangkau di Kec. Kandangan luasnya 615 Ha
 - Danau Paharangan di Kec. Daha Utara luasnya 8 Ha

- Danau Pantai Ulin di Kec. Simpur luasnya 5 Ha
 - Danau Muning Dalam di Kec. Daha Selatan luasnya 5Ha
 - Danau Bago Tanggul di Kec. Kalumpang luasnya 56 Ha
 - Danau Bajayau Lama di Kec. Daha Barat luasnya 6 Ha
4. Ruang terbuka Hijau Kota (RTH) (Khusus untuk Kota)
- RTH publik : lapangan olah raga, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, rel kereta api dan sungai 30%
 - RTH privat : berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan
5. Kawasan suaka alam dan cagar budaya
- Kawasan Suaka Alam berada di Cagar Alam Gunung Kentawan luas 240 Ha
 - Kawasan Cagar Alam Budaya dan Ilmu Pengetahuan
 - a. Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi di Kec. Daha Selatan
 - b. Mesjid Su'ada di Kec. Simpur
 - c. Benteng Madang di Kec. Padang Batung
 - d. Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih
 - e. Makam Tumpang Talu di Kec. Kandangan
 - f. Kubur Anam di Kec. Sungai Raya
 - g. Rumah Bersejarah H. Kaspul Anwar di Kec. Padang Batung
 - h. Rumah Bersejarah H. Abdul Kadir di Kec. Padang Batung
6. Kawasan rawan bencana alam
- Bencana Longsor
 - a. Kec. Loksado di Desa Hulu Banyu

- b. Kec. Padang Batung di desa Batu Laki
- c. Kec. Telaga Langsat di Desa Hamak dan Hamak Utara
- Bencana Banjir
 - a. Kec. Kandangan :
 - 1 . Desa Jambu Hilir
 - 2 . Desa Baluti
 - 3 . Desa Sungai Kupang
 - 4 . Desa Sungai Paring
 - 5 . Desa Lungau
 - b. Kec. Kalumpang :
 1. Desa kalumpang
 2. Desa Karang Paci
 3. Desa Balanti
 4. Desa Balimau
 - c. Kec. Angkinang :
 1. Desa Telaga Sili-sili
 2. Desa Sungai Hanyar
 3. Desa Angkinang
 4. Desa Angkinang selatan
 5. Desa Bakarung
 - d. Kec. Sungai Raya :
 1. Desa Sungai Raya Selatan
 2. Desa Tanah Bangkang
 3. Desa Ida Manggala

e. Kec. Padang Batung :

1. Desa Malutu
2. Desa Batu Laki
3. Desa Malilingin
4. Desa Jelatang
5. Desa Batu Bini
6. Desa Karang Jawa Muka

f. Kec. Telaga Langsat :

1. Desa Mandala
2. Desa Lok Binuang
3. Desa Pakuan Timur
4. Desa Gumbil

g. Kec. Daha Selatan

h. Kec. Daha Utara

i. Kec. Daha Barat

7. Kawasan lindung lainnya

- Reservaat Danau Bangkau di Desa Bangkau Kec. Kandangan luasnya 10 Ha
- Reservaat Sungai Jarum di Desa Bangkau Kec. Kandangan luasnya 100 Ha
- Kawasan rawa Simpurn di Tanggul Desa Pantai Ulin Kec. Simpurn luasnya 5 Ha
- Kawasan Bago Tanggul di Desa Bago Tanggul Kec. Kalumpang luasnya 5 Ha
- Kawasan Bajayau Lama di Desa Bajayau Lama Kec. Daha Barat luasnya 5 Ha
- Kawasan Muning Dalam di Desa Muning Dalam Kec. Daha Selatan luasnya 6 Ha

Kawasan budi daya

Dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Budidaya terdiri dari :

1. Kawasan Hutan produksi

- Kawasan Hutan Produksi Tetap
 - a. Kec. Loksado luasnya 4.545 Ha
 - b. Kec. Padang Batung luasnya 7.702 Ha
 - c. Kec. Sungai Raya luasnya 444 Ha
 - d. Kec. Telaga Langsung luasnya 399 Ha
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi
 - a. Kec. Daha Barat luasnya 2.415 Ha
 - b. Kec. Daha Selatan luasnya 5.464 Ha
 - c. Kec. Daha Utara luasnya 10.843 Ha

2. Kawasan pertanian

- Kawasan Peruntukan pertanian tanaman pangan
 - a. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah luasnya 12.981 Ha
 1. Kec. Sungai raya
 2. Kec. Simpur
 3. Kec. Kandangan
 4. Kec. Telaga Langsung
 5. Kec. Daha Utara
 6. Kec. Padang Batung
 7. Kec. Kalumpang

8. Kec. Angkinang
 9. Kec. Daha Selatan
 10. Kec. Daha Utara
 11. Kec. Daha Barat
- b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering/tegalan luasnya 3.797 Ha
1. Kec. Padang Batung
 2. Kec. Sungai Raya
 3. Kec. Telaga Langsat
 4. Kec. Loksado
- Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura luasnya 3.797 Ha dengan jenis komoditas
 - a. Buah-buahan berupa semangka meliputi :
 - Kec. Telaga Langsat
 - Kec. Padang Batung
 - Kec. Daha Barat
 - Kec. Daha Selatan
 - Kec. Daha Utara
 - b. Sayur-sayuran meliputi :
 - Kec. Sungai Raya
 - Kec. Telaga Langsat
 - Kec. Kandangan
 - Kec. Angkinang
 - Kec. Padang Batung
 - Kec. Simpur

3. Kawasan perkebunan

- Kawasan Perkebunan
 - a. Perkebunan Karet luasnya 23.839 Ha yaitu ada di
 - Kec. Telaga Langsat
 - Kec. Padang Batung
 - Kec. Loksado
 - Kec. Sungai raya
 - Kec. Angkinang
 - b. Perkebunan Kelapa Sawit luasnya 48.955 Ha yaitu ada di
 - Kec. Angkinang
 - Kec. Daha Barat
 - Kec. Daha Selatan
 - Kec. Daha Utara
 - Kec. Kalumpang
 - Kec. Kandangan
 - Kec. Simpur
 - c. Perkebunan Kayu manis
 - Kec. Loksado
 - d. Perkebunan Kelapa
 - Kec. Simpur
 - Kec. Kalumpang
 - Kec. Sungai raya
 - Kec. Padang Batung
 - Kec. Telaga Langsat

-Kec. Kandangan

-Kec. Angkinang

4. Kawasan Peternakan

a. Ternak sapi potong

- Daerah sentra sapi meliputi : Kec. Sungai Raya, Kec. Simpur, dan Kec.

Kalumpang

- Daerah pengembangan meliputi : Kec. Kandangan, Kec. Padang Batung,

Kec. Angkinang, Kec. Telaga Langsung dan Kec. Loksado

b. Ternak Kerbau Rawa

- Kec. Daha Barat

- Kec. Daha Utara

c. Ternak kambing berada di seluruh Kecamatan

d. Ternak domba

- Kec. Kandangan

- Kec. Daha Selatan

e. Ternak ayam buras dan ayam ras berada di seluruh kecamatan

f. Ternak itik

- Daerah sentra meliputi Kec. Daha Utara

- Daerah pengembangan meliputi : Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Barat, Kec.

Kalumpang, Kec. Simpur, dan Kec. Angkinang.

5. Kawasan perikanan

• Kawasan Perikanan

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di sekitar sungai besar dan

danau luasnya 2.059 Ha meliputi :

- Kec. Daha Barat
 - Kec. Daha Selatan
 - Kec. Daha Utara
 - Kec. Kandangan
 - Kec. Simpur
 - Kec. Kalumpang
- b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan
- Pengembangan kawasan perikanan kolam meliputi : Kec. Kandangan, Kec. Daha Selatan, dan Kec. Kalumpang.
 - Pengembangan kawasan perikanan keramba meliputi : Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Barat.
- c. Kawasan pengolahan ikan
- Kec. Daha Selatan
 - Kec. Daha Utara
 - Kec. Daha Barat
 - Kec. Kandangan
 - Kec. Kalumpang
- d. Kawasan peruntukan perikanan minapolitan berada di Desa Muning Kec. Daha Selatan
6. Kawasan pertambangan
- Mineral logam
 - a. Emas berada di Kec. Loksado
 - b. Mangan berada di Desa Tampak Pipi'I, Desa Bukuanin dan Desa Mawangi
Kec. Padang Batung

- c. Besi berada di Desa Malaris, Desa Kamawakan, Desa S. Tinggiran, dan
Desa S. Landuyan Kec. Loksado
- Mineral bukan logam
 - a. Pasir kuarsa berada di Desa Malilingin Kec. Padang Batung
 - b. Fosfat meliputi
 - Desa Gn. Batu Laki dan Desa Gn. Batu Bini Kec. Padang Batung
 - Desa Gn. Liang Mandala dan Desa Gn. Burit Sanga Kec. Telaga Langsat
 - c. Lempung meliputi :
 - Desa Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, Desa Madang, Desa Pandulangan
di Kec. Padang Batung
 - Desa Angkinang Kec. Angkinang
 - Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya
 - Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kec.
Telaga Langsat
- Batuan
 - a. Marmer berada di Desa Datar Kedayang, Desa Gn. Langara, dan Desa Gn.
Kantawan Kec. Loksado
 - b. Granit berada di Desa Kamawakan Kec. Loksado
 - c. Andesit meliputi :
 - Kec. Loksado
 - Kec. Padang Batung
 - Gabro berada di Kec. Loksado
 - d. Basalt
 - Desa Haratai Kec. Loksado

- Desa Padang Batung, Desa Durian Rabung Kec. Padang Batung.
- e. Tanah liat
 - Desa Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, desa Madang, dan Desa Pandulangan Kec. Padang Batung
 - Desa Angkinang Kec. Angkinang
 - Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya
 - Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kec. Telaga Langsat
- f. Tanah urug berada di Desa Padang Batung dan Desa Tambak Pipi'i di Kec. Padang Batung
- g. Kerikil berpasir alami (sirtu) meliputi :
 - Sepanjang Sungai Amandit di Kec. Padang Batung
 - Sepanjang Sungai Amandit di Kec. Sungai Raya
- h. Batu gamping meliputi :
 - Desa Gn. Batu Laki dan Desa Gn. Batu Bini, Desa Tayub, dan Desa Mandapai di Kec. Padang Batung
 - Desa Gn. Liang Mandala, Desa Gn. Burit Sanga di Kec. Telaga Langsat
 - Desa Datar Kedayang, Desa Haratai, dan Desa Tanuhi di Kec. Loksado.
- Batu bara
 - a. Bitumen padat di Desa Malutu Kec. Padang Batung
 - b. Desa Malutu, Desa Panglima Dambung, Desa Batu Bini, Desa Durian Rabung, Desa Muara Pipi'i, Desa Malilingin, Desa Kuangan, Desa Gn. Batubarang, Desa Gn. Pancur Binjai, Desa Pariangan, Desa Mandapai, Desa Tambak Pipi'i, Desa Tayub Kec. Padang Batung

c. Desa Taniti di Kec. Telaga Langsat

7. Kawasan industri

Kawasan industri kecil dan mikro meliputi :

a. Industri Dodol Kandangan meliputi :

- Desa Kapuh Kec. Simpur
- Desa Telaga Bidadari, Desa Hamalau, dan Desa Hariti Kec. Sungai Raya
- Desa Gambah Luar, Desa Kandangan Barat dan Desa Kandangan Utara
Kec. Kandangan

b. Industri kerupuk berada di Bamban Utara Kecamatan Angkinang

c. Industri ikan kering meliputi :

- Desa Bangkau Kec. Kandangan
- Desa Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang
- Desa Muning dan Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan

d. Industri propeler berada di Desa Penggadingan dan Desa Pekapuran Kecil
Kecamatan Daha Utara

e. Industri imitasi berada di Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan

f. Industri pandai besi berada di Desa Sungai Pinang dan Desa Tumbukan Banyu
Kecamatan Daha Selatan

g. Industri gerabah berada di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan

h. Industri kue kering meliputi :

- Desa Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya
- Desa Kapuh Kec. Simpur

i. Industri anyaman bambu berada di Desa Malinau, Desa Ulang dan Desa
Panggung Kecamatan Loksado

- j. Industri Anyaman Purun berada di Desa Balimau dan Desa Karang Paci Kec. Kalumpang
 - k. Industri Kumpang Parang berada di Desa Sarang Halang dan Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya
 - l. Industri Gula merah meliputi :
 - Desa Jambu Hulu, Desa Jambu Hilir Kec. Kandangan
 - Desa Baru Hulu, Desa Baru Tengah, Desa Asam-Asam, Desa Tamiyang, Desa Karasikan, Desa Batang Kulur Kanan, Desa Batang Kulur Kiri, Desa Bumi Berkat Kec. Sungai Raya.
8. Kawasan pariwisata
- Pariwisata Budaya
 - a. Wisata Budaya Lokal meliputi :
 - Balai Adat Dayak di Kec. Loksado
 - Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi di Desa Habirau Kec. Daha Selatan
 - Rumah Adat Banjar Gajah Manyusu di Desa Amawang Kec. Kandangan
 - Upacara Aruh Ganal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - Seni Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga) di Kec. Daha Selatan
 - Olahraga Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - Kalang Hadangan di Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Barat
 - b. Wisata Sejarah meliputi :
 - Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih Kec. Loksado

- Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV di Kec. Telaga Langsat
 - Tugu Garis Demarkasi di Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung.
 - Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Jelatang Kec. Padang Batung
 - Gedung Juang Devisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Halamau Kec. Sungai Raya
 - Situs Benteng Madang di Desa Madang Kec. Padang Batung
 - Situs Amuk Hantarukung di Desa Hantarukung Kec. Simpur
 - Makam Tumpang Talu di Kandangan Barat Kec. Kandangan
 - Kubur Anam di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya
 - Makam Singakarsa di Jln. Singakarsa Kec. Kandangan
 - Makam aluh Idut di Jln. Aluh Idut Kec. Kandangan
 - Tugu 2 Januari (Tugu Hamayung) di Desa Hamayung Kec. Daha Utara
 - Makam Ning Bulang di desa Hantarukung Kec. Simpur
 - Rumah Bersejarah
- c. Wisata Religi meliputi :
- Masjid Su'ada di Desa Wasah Hilir Kec. Simpur
 - Makam H. M Said di Desa Simpur Kec. Simpur
 - Makam Datu H. Abbas di Desa Simpur Kec. Simpur
 - Kubah Datu Durabu di Desa Kalumpang Kec. Kalumpang
 - Kubah Taniran di Desa Taniran Kec. Angkinang
 - Makam Keramat Datu H.M Rais di Desa Loknyiur Kec. Angkinang
 - Makam Datu Daha Kec. Daha Utara

- Makam Surgi Tuan di Desa Pasungkan Kec. Daha Utara
- Makam Habib Ibrahim Desa Mandala Kec. Daha Utara
- Makam Tuan Guru H. Ali di Desa Pandansari Kec. Daha Selatan
- Makam Habib Lumpangi di desa Lumpangi Kec. Loksado

d. Pariwisata Alam

- Wisata Alam Loksado di Kec. Loksado
- Air Terjun Haratai di Kec. Loksado
- Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kec. Loksado
- Gunung Kentawan di Desa Tanuhi Kec. Loksado
- Danau Bangkau di Desa Kec. Kandangan
- Delta dan Dam Sungai Amandit di Desa Malutu Kec. Padang Batung
- Riam Anai di Desa Lok LahungKec. Loksado
- Air Terjun Kilat Api di Desa Tanuhi Kec. Loksado
- Air Terjun Uring di Desa Kamawakan Kec. Loksado
- Air Terjun Tangkaramin di Desa Malinau Kec. Loksado
- Air Terjun Tinggiran Hayam di Desa Kamawakan Kec. Loksado
- Air Panas Mandapai di Desa Batu Bini Kec. Padang Batung
- Telaga Bidadari di Desa Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya

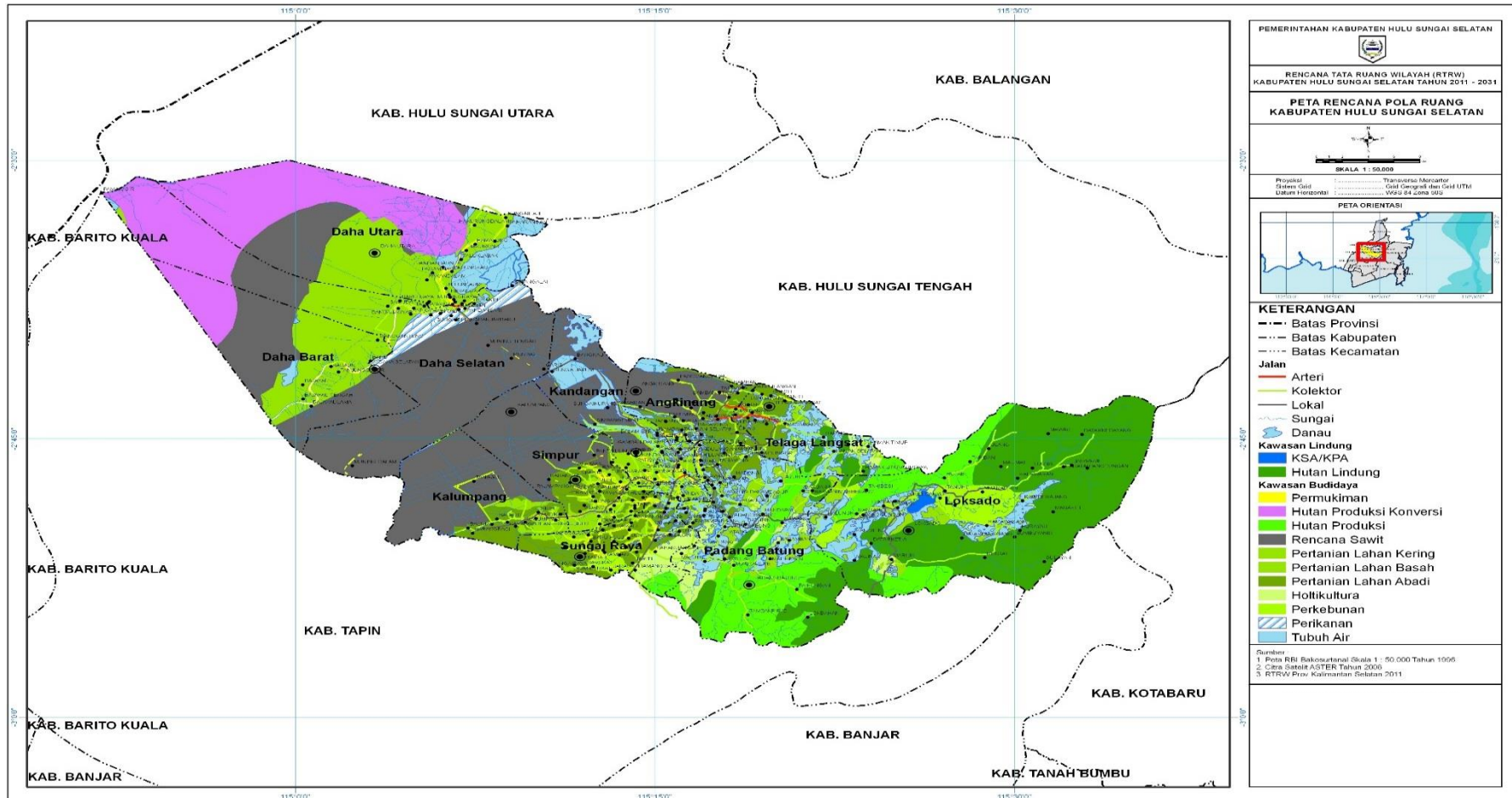
9. Kawasan permukiman

- Kawasan Peruntukan Pemukiman luasnya 4.533 Ha
 - a. Kawasan Peruntukan permukiman perkotaan terdiri atas :
 - Kawasan Perkotaan Kandangan di Kec. Kandangan
 - Kawasan Perkotaan Angkinang di Kec. Angkinang
 - Kawasan Perkotaan Sungai Raya di Kec. Sungai Raya

- Kawasan Perkotaan Nagara di Kec. Daha Selatan dan Daha Utara
 - Kawasan Perkotaan Simpur di Kec. Simpur
 - Kawasan Perkotaan Loksado di Kec. Loksado
- b. Kawasan Peruntukan permukiman perdesaan mencakup semua permukiman di luar kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten.

10. Kawasan lainnya

- Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi :
 - a. Pasar Los Batu Kec. Kandangan
 - b. Pasar Nagara Kec. Daha Selatan
 - c. Pasar Hewan Kec. Angkinang
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas :
 - a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Kec. Kandangan
 - b. Komando Rayon Militer Tersebar di wilayah Kabupaten
 - c. Kawasan Kepolisian meliputi :
 - Kepolisian Resort berada di Kec. Sungai Raya dan Kec.Loksado
 - Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten



Gambar 2.2
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu sungai Selatan

2.2. Perkembangan Ekonomi Daerah

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan diukur dari besaran PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, menunjukkan perkembangan yang selalu meningkat selama periode 2013 sampai dengan 2016. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 meningkat dari 4,7 triliun pada tahun 2014 menjadi 5,2 triliun rupiah.

Tabel 2.4. Pertumbuhan PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2016

Tahun	Harga berlaku (Juta Rupiah)	Harga konstan (Juta Rupiah)
2013	3.801.446,16	3.334.465,09
2014	4.258.173,45	3.527.586,59
2015	4.782.347,48	3.741.146,62
2016	5.236.784,76	3.968.727,46

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

Tabel 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2016

No	Sektor/Industri	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.63	4.37	4.97	5.84
2	Pertambangan dan Penggalian	35.79	9.09	5.19	7.11
3	Industri Pengolahan	2.12	3.51	4.46	6.17
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-2.25	21.97	22.49	7.16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.77	8.39	6.77	6.31
6	Konstruksi	5.07	5.09	5.74	5.35
7	Perdagangan Besar dan Eceran	6.30	5.85	5.95	5.76
8	Transportasi dan Pergudangan	7.09	5.54	5.50	4.92

No	Sektor/Industri	2013	2014	2015	2016
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	5.62	6.69	7.02	8.23
10	Informasi dan Komunikasi	7.87	8.43	8.79	7.80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	13.66	6.63	4.22	8.88
12	Real Estate	8.68	5.44	5.58	5.94
13	Jasa Perusahaan	4.30	6.82	6.64	8.12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	5.76	5.73	8.68	2.04
15	Jasa Pendidikan	7.46	7.38	8.63	8.68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.56	6.61	7.80	8.44
17	Jasa Lainnya	3.60	7.68	5.97	7.29
Perumbuhan PDRB		5.68	5.79	6.05	6.08

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2016 perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan tumbuh sebesar 6,08 persen meningkat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,05 persen dan tahun 2014 yang tumbuh mencapai 5,79 persen.

2.2.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sampai dengan tahun 2016 sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam perekonomian kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, program pembangunan diprioritaskan bidang pertanian yang disinergikan dengan bidang / sektor lain.

Tabel 2.6. Struktur PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2011-2015

(Persen/ percentage)

No	Sektor/Industri	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.65	27.51	27.02	27.24	27.29
2	Pertambangan dan Penggalian	7.60	9.41	9.27	8.13	7.57

No	Sektor/Industri	2012	2013	2014	2015	2016
3	Industri Pengolahan	8.46	8.05	7.96	7.98	8.13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.37	0.35	0.36	0.37	0.36
6	Konstruksi	7.87	7.79	7.94	8.17	8.04
7	Perdagangan Besar dan Eceran	9.12	9.25	9.31	9.18	9.22
8	Transportasi dan Pergudangan	5.13	5.24	5.25	5.15	5.10
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	3.46	3.45	3.57	3.56	3.60
10	Informasi dan Komunikasi	4.26	4.20	4.29	4.21	4.19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.93	2.06	2.13	2.07	2.11
12	Real Estate	2.48	2.52	2.52	2.47	2.45
13	Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	9.09	9.55	9.54	10.07	9.60
15	Jasa Pendidikan	7.07	7.07	7.17	7.52	7.94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.82	1.88	1.94	2.04	2.10
17	Jasa Lainnya	1.55	1.52	1.58	1.64	2.10
PDRB HSS		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

2.2.3. PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita suatu wilayah merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk, namun demikian indikator yang lazim digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah dengan pendekatan pengeluaran per kapita dan PDRB per kapita. Data rata-rata pendapatan (Income) per kapita digunakan untuk mendapatkan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk

selama satu tahun di suatu wilayah dan waktu tertentu. PDRB Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PRDB dengan penduduk pada tahun yang sama di wilayah studi.

Tabel 2.7. PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012—2016

PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Perkapita (ADHB)	15.743.437	17.153.457	18.969.562	21.053.420	22.779.623
PDRB Perkapita (ADHK)	14.413.916	15.046.275	15.714.901	16.469.721	17.263.668
PDRB Perkapita (ADHB) %	7,32	8,96	10,59	10,99	8,20
PDRB Perkapita (ADHK) %	3,93	4,39	4,44	4,80	4,82

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan, 2017 (diolah)

PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Hulu Sungai Selatan mencapai 22,7 juta Rupiah dengan pertumbuhan atas harga berlaku sebesar 8,20 persen. Namun, apabila diukur dalam USD maka PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk dalam kategori berpendapatan menengah bawah.

Dilihat dari sisi PDRB per kapita konstan, PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus meningkat dari tahun 2013 sebesar 3,93 persen menjadi 4,82 persen pada tahun 2016. Kondisi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.3. Sektor Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3.1. Analisis LQ

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis (basic sektor) dan sektor mana yang bukan sektor basis (non basic sektor). Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor antara daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relatif ini dapat dinyatakan secara matematika sebagai berikut (Warpani 2001):

$$LQ = \frac{Si/s}{Ni/N}$$

Keterangan:

- LQ : Nilai Location Quotient
- Si : PDRB Sektor i di Kabupaten
- S : PDRB total di Kabupaten
- Ni : PDB Sektor i Provinsi Kalimantan Selatan
- N : PDB total di Provinsi Kalimantan Selatan

Satuan yang dapat digunakan untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan satuan jumlah buruh, atau hasil produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria (Warpani, 2001). Apabila hasil perhitungannya menunjukkan $LQ > 1$, berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan $LQ < 1$, berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor). Teknik ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor industri di daerah adalah sama dengan

produktivitas pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor dan bahwa perekonomian bangsa yang bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup.

Analisis LQ memiliki kelebihan antara lain merupakan alat analisis sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri substitusi impor potensial atau produk-produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan industri-industri potensial (sektoral) untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah. Analisis LQ ini juga digunakan untuk menghitung potensi produk unggulan dari hasil pemanfaatan sumber daya alam pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pariwisata pada beberapa wilayah dan dapat diketahui wilayah mana yang paling potensi untuk produk-produk tertentu sehingga dapat ditetapkan sebagai wilayah/daerah basis atau non basis.

2.3.1.1. Model LQ Sektor Basis PDRB

Pembahasan mengenai model basis ekonomi diarahkan untuk memahami bagaimana suatu wilayah sebagai bagian dari suatu wilayah yang lain dapat terbentuk, dan berbagai aktivitas yang menyertai dari pembentukan dan pengisian kabupaten. Analisis ini dapat juga dijadikan sebagai landasan bagi analisis pengembangan potensi sektor ekonomi di suatu wilayah.

Analisis LQ pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan diterapkan dengan membandingkan aktivitas perekonomian (PDRB) Hulu Sungai Selatan dengan

aktivitas perekonomian (PDRB) Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan besaran nilai LQ per sektor dalam perekonomian Hulu Sungai Selatan untuk tahun 2012 sampai dengan 2016.

Tabel 2.8. Perhitungan besaran nilai LQ per sektor Hulu Sungai Selatan untuk tahun 2012 sampai dengan 2016

No	Sektor/Industri	Nilai LQ					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.01	1.89	1.84	1.83	1.83	1.88
2	Pertambangan dan Penggalian	0.26	0.33	0.34	0.35	0.36	0.33
3	Industri Pengolahan	0.64	0.62	0.61	0.60	0.58	0.61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.70	0.64	0.68	0.66	0.59	0.65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.02	1.00	0.97	0.95	0.90	0.97
6	Konstruksi	1.15	1.13	1.11	1.06	1.02	1.09
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.17	1.15	1.11	1.03	0.98	1.09
8	Transportasi dan Pergudangan	0.96	0.93	0.90	0.83	0.79	0.88
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	2.01	1.95	1.93	1.87	1.84	1.92
10	Informasi dan Komunikasi	1.39	1.38	1.34	1.29	1.24	1.33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.65	0.63	0.64	0.60	0.59	0.62
12	Real Estate	1.21	1.21	1.17	1.12	1.08	1.16
13	Jasa Perusahaan	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	1.72	1.70	1.68	1.60	1.55	1.65
15	Jasa Pendidikan	1.86	1.82	1.78	1.69	1.63	1.76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.18	1.18	1.16	1.11	1.08	1.14
17	Jasa Lainnya	1.55	1.55	1.50	1.44	1.75	1.56
	LQ HSS	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan, 2017 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat nilai LQ-nya sektor dapat ditunjukkan bahwa pada pada tahun 2016 dan nilai rata-rata per tahun, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak sektor yang bisa menjadi andalan (basis) bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan karena memiliki nilai di atas 1 (satu) dan sektor lainnya memiliki nilai di bawah 1 yang bukan merupakan sektor basis. Dengan

demikian sektor andalan (basis) yang primer untuk dapat dikembangkan ke industri adalah Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan karena sektor lainnya adalah sektor tersier atau jasa.

2.3.1.2. Model LQ Sub Sektor Basis PDRB

Hasil perhitungan besaran nilai LQ yang dapat menjadi andalan (Basis) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan industri pengolahan. Besaran Nilai LQ Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat menjadi sektor andalan (basis) berdasarkan kontribusi sub sektor yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012-2016

No	Sektor/Industri	2012	2013	2014	2015	2016	Rata - Rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.01	1.89	1.84	1.83	1.83	1.88
1.1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.23	2.09	2.03	2.06	2.08	2.10
	a. Tanaman Pangan	2.92	2.66	2.60	2.49	2.41	2.62
	b. Tanaman Hortikultura	2.23	2.03	2.07	1.83	1.85	2.00
	c. Tanaman Perkebunan	0.82	0.75	0.69	0.73	0.75	0.75
	d. Peternakan	1.78	1.74	1.74	1.66	1.61	1.71
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	2.01	1.96	1.93	1.85	1.79	1.91
1.2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.54	0.53	0.52	0.50	0.49	0.51
1.3	Perikanan	1.52	1.49	1.45	1.39	1.34	1.44

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan, 2017 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat dari nilai LQ-nya Sub sektor, dapat ditunjukkan bahwa rata-rata sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

menjadi andalan (basis) dengan rata-rata nilai LQ 2,10% dengan kontribusi nilai tanaman pangan, tanaman Hortikultura, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan. Selanjutnya untuk sub sektor Perikanan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 1,44%.

Selanjutnya Hasil perhitungan besaran nilai LQ sektor sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun 2012 sampai dengan 2016 maka dapat diketahui bahwa yang dapat menjadi sub sektor andalan (basis) Sektor industri pengolahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012-2016

No	Sektor/Industri	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
3	Industri Pengolahan	0.64	0.62	0.61	0.60	0.58	0.61
	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Industri Makanan dan Minuman	0.78	0.75	0.74	0.71	0.68	0.73
	Industri Pengolahan Tembakau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.79	0.78	0.77	0.73	0.71	0.75
	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	0.78	0.76	0.74	0.71	0.68	0.73
	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13
	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Industri karet, barang dari karet dan plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Industri Barang Galian bukan Logam	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16
	Industri Logam Dasar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Industri Barang Logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	10.90	10.58	10.29	9.84	9.59	10.24
	Industri Mesin dan Perlengkapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Industri Alat Angkutan	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19
	Industri Furnitur	1.07	1.01	0.99	0.95	0.89	0.98
	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1.72	1.70	1.68	1.62	1.52	1.65

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan, 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil perhitungan LQ secara keseluruhan rata-rata sektor industry pengolahan yaitu 0,61% yang berarti dapat dikembangkan. Sub sektor yang mendominasi hasil perhitungang LQ Sektor Industri Pengolahan yaitu sub sektor Industri Barang Logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik dengan rata-rata 10,24% dan sub sektor Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan dengan rata-rata 1,65%,.

Sektor andalan (basis) yang primer untuk dapat dikembangkan ke industri adalah Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan, dengan demikian maka nilai LQ Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khusus untuk komoditas tanaman pangan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan Per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Produksi Komoditas							Rata-rata
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar	
1	Padang Batung	0.69	3.20	3.69	12.25	6.65	3.12	0.42	4.29
2	Loksado	-	9.38	1.88	0.19	-	-	-	1.64
3	Telaga Langsat	0.90	1.98	-	0.93	2.07	4.25	0.09	1.46
4	Angkinang	1.15	-	4.12	0.30	4.58	2.49	0.07	1.82
5	Kandangan	1.16	-	-	0.13	-	3.60	-	0.70
6	Sungai Raya	1.17	0.10	-	0.02	-	-	-	0.18
7	Simpur	1.11	0.53	-	-	-	-	-	0.23
8	Kalumpang	1.18	-	-	-	-	-	-	0.17
9	Daha selatan	0.95	-	-	-	-	-	5.55	0.93
10	Daha Barat	1.18	-	-	-	-	-	-	0.17
11	Daha Utara	1.18	-	1.69	-	-	-	-	0.41
LQ Tanaman Pangan		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan, 2017 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata berdasarkan jumlah produksi, maka ada 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat menjadi basis komoditas tanaman pangan karena nilai LQ yang di atas 1 yaitu Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Kecamatan Angkinang. Untuk komoditas padi sawah, hampir tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecuali Kecamatan Loksado. Selanjutnya nilai LQ Sub Sektor Produksi Sayuran Menurut kecamatan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Hasil Perhitungan Model LQ Produksi Sayuran Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Produksi Komoditas								Rata-rata
		Bawang Merah	Kacang Panjang	Buncis	Cabe Rawit	Cabe Besar	Mentimun	Terong	Tomat	
1	Padang Batung	2.47	0.78	1.09	2.54	0.55	0.29	0.66	0.55	1.12
2	Loksado	-	0.44	1.27	3.93	0.40	-	-	-	0.76
3	Telaga Langsat	-	1.88	3.66	1.09	0.64	1.41	1.21	1.10	1.37
4	Angkinang	-	3.45	-	0.76	0.55	2.35	1.11	1.19	1.18
5	Kandangan	-	1.48	1.21	0.80	0.61	4.01	1.31	0.81	1.28
6	Sungai Raya	9.33	0.03	0.33	0.43	1.13	0.18	1.03	1.16	1.70
7	Simpur	-	0.12	-	1.16	1.16	0.07	0.51	1.25	0.54
8	Kalumpang	-	0.17	-	0.28	1.22	-	-	2.04	0.46
9	Daha selatan	-	-	-	0.40	1.74	-	0.04	1.14	0.42
10	Daha Barat	-	-	-	0.22	1.79	-	2.48	0.77	0.66
	Daha Utara	-	-	-	0.40	1.52	-	0.26	1.44	0.45
	LQ Produksi Sayuran	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan, 2017 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata berdasarkan jumlah produksi, maka ada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat menjadi basis

komoditas sayuran karena nilai LQ yang di atas 1 yaitu Kecamatan Padang Batung, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, dan Sungai Raya. Untuk komoditas cabe rawit, cabe besar dan tomat tersebar hampir di seluruh kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya nilai LQ Sub Sektor Produksi Buah-buahan Menurut kecamatan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13. Hasil Perhitungan Model LQ Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Produksi Komoditas											Rata-rata	
		Belimbing	Duku	Durian	Jeruk Siam	Mangga	Nanas	Nangka	Pepaya	Pisang	Rambutan	Sawo		Semangka
1	Padang Batung	1.67	3.99	0.39	0.13	3.31	-	2.57	-	0.46	1.84	2.11	0.04	1.37
2	Loksado	5.56	0.41	2.71	-	-	-	0.12	-	8.16	-	-	-	1.41
3	Telaga Langsat	1.63	0.49	11.84	1.20	0.66	-	2.53	2.82	5.96	2.49	3.34	0.03	2.75
4	Angkinang	1.37	2.94	-	5.77	-	6.72	4.14	13.17	1.16	3.82	-	-	3.26
5	Kandangan	5.26	1.08	4.43	26.65	-	2.18	1.64	6.35	0.37	10.31	-	-	4.86
6	Sungai Raya	10.97	0.63	24.89	7.69	32.31	1.95	29.83	-	0.33	-	-	0.17	9.06
7	Simpur	6.09	0.11	-	-	-	17.90	1.06	6.97	5.55	6.94	22.10	-	5.56
8	Kalumpang	-	0.31	9.52	1.96	1.28	26.04	2.25	2.93	7.32	-	4.22	-	4.65
9	Daha selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	0.14
10	Daha Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	0.14
11	Daha Utara	-	-	-	-	-	2.36	-	0.07	-	0.19	-	1.58	0.35
	LQ Produksi Buah-buahan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan, 2017 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata berdasarkan jumlah produksi, maka ada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat menjadi basis komoditas buah-buahan karena nilai LQ yang di atas 1 yaitu Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, dan Kelumpang. Selanjutnya Nilai LQ Sub Sektor Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Produksi Komoditas									Rata-rata
		Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao	Cengkeh	Kemiri	Aren	Kayu Manis	
1	Padang Batung	1.21	0.87	1.09	2.68	0.94	2.76	0.11	2.09	-	1.31
2	Loksado	1.25	0.02	1.07	0.71	-	0.95	2.33	0.20	2.38	0.99
3	Telaga Langsat	1.43	0.24	1.31	1.52	-	-	0.01	1.44	-	0.66
4	Angkinang	0.62	0.80	1.72	-	5.28	-	-	0.52	-	0.99
5	Kandangan	0.06	2.28	1.33	0.08	4.69	0.23	-	0.38	-	1.00
6	Sungai Raya	0.73	2.82	0.33	0.06	0.54	0.16	-	2.50	-	0.79
7	Simpur	0.02	4.44	-	0.21	2.95	-	-	1.02	-	0.96
8	Kalumpang	-	4.50	-	0.31	-	-	-	0.43	-	0.58
9	Daha selatan	-	-	2.83	-	-	-	-	-	-	0.31
10	Daha Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Daha Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LQ Perkebunan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan, 2017 (diolah)

Berdasarkan hasil LQ rata-rata jumlah produksi, hanya ada 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat menjadi basis komoditas Perkebunan karena nilai LQ yang di atas 1. Komoditas Perkebunan yang menyebar di Sebelas kecamatan didominasi oleh komoditas karet, kelapa sawit, kelapa dan kopi. Sedangkan untuk komoditas Sawit yang merupakan komoditas unggulan Provinsi Kalimantan Selatan hanya di Kecamatan Banjar dan untuk komoditas karet hanya tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, dan Daha Selatan. Selanjutnya nilai LQ Sub Sektor Peternakan Menurut kecamatan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.15. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Peternakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Ayam Kampus	Ayam Petelor	Ayam Pedaging	Itik	Rata-rata
----	-----------	------	--------	---------	-------------	--------------	---------------	------	-----------

1	Padang Batung	0.81	-	0.10	1.55	1.15	0.85	0.14	0.66
2	Loksado	0.07	-	0.39	2.35	-	-	0.14	0.42
3	Telaga Langsung	0.66	-	0.38	1.40	-	0.94	0.27	0.52
4	Angkinang	0.62	-	2.88	1.74	-	0.39	0.63	0.90
5	Kandangan	1.01	-	1.95	0.18	3.80	1.78	1.16	1.41
6	Sungai Raya	1.48	-	0.75	0.45	-	1.42	1.33	0.78
7	Simpur	2.21	-	1.03	0.80	2.34	1.09	1.22	1.24
8	Kalumpang	0.99	-	0.32	0.92	-	1.21	0.75	0.60
9	Daha selatan	0.09	-	0.11	1.34	-	-	2.29	0.55
10	Daha Barat	-	8.77	-	0.37	-	-	4.34	1.93
11	Daha Utara	0.18	144.13	4.68	2.28	-	-	-	21.61
LQ Peternakan		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan, 2017 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata jumlah produksi, maka ada 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat menjadi basis Peternakan karena nilai LQ yang di atas 1 yaitu Kecamatan Kandangan, Simpur, Daha Barat, dan Daha Utara. Selanjutnya nilai LQ Sub Sektor Perikanan Menurut kecamatan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Rata-rata
1	Padang Batung	-	6.09	3.04
2	Loksado	-	6.09	3.04
3	Telaga Langsung	-	6.09	3.04
4	Angkinang	1.12	0.41	0.76
5	Kandangan	1.15	0.22	0.69
6	Sungai Raya	-	6.09	3.04
7	Simpur	1.15	0.23	0.69
8	Kalumpang	1.18	0.09	0.63
9	Daha selatan	0.92	1.43	1.17
10	Daha Barat	1.04	0.78	0.91
11	Daha Utara	0.85	1.75	1.30

No	Kecamatan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Rata-rata
	LQ Perikanan	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan, 2016 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata berdasarkan jumlah produksi, maka ada 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat menjadi basis komoditas Perikanan karena nilai LQ yang di atas 1 yaitu Kecamatan Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Sungai Raya, Daha Selatan dan Daha Utara.

2.3.2. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui perubahan struktur/kinerja ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi (kabupaten atau provinsi) sebagai referensi. Perubahan relatif kinerja pembangunan daerah terhadap Provinsi dapat dilihat dari:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional (*national growth effect*), bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi regional terhadap daerah.
2. Pergeseran proporsi (*proportional shift*), mengukur perubahan relatif (naik/turun) suatu sektor daerah terhadap sektor yang sama di tingkat regional, disebut juga pengaruh bauran industri/industry mix.
3. Pergeseran diferensial (*differential shift*), mengetahui seberapa kompetitif sektor tertentu daerah dibanding regional. Jika nilainya (+) berarti kompetitif, (-) tidak kompetitif, disebut juga pengaruh kompetitif.

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat dilihat sebagai suatu perubahan yang berkaitan dengan komposisi pergeseran penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB suatu wilayah. Analisis Shift Share adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional).

Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh: pertumbuhan nasional (N), industri mix/bauran industri (M), dan keunggulan kompetitif (C).

Persamaan Shift Share
$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan:

i : sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j : variabel wilayah yang diteliti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

n : variabel wilayah Indonesia

D_{ij} : perubahan sektor i di daerah j di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

N_{ij} : pertumbuhan nasional sektor i di daerah j di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

M_{ij} : bauran industri sektor i di daerah j di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

C_{ij} : keunggulan kompetitif sektor i di daerah j di Kabupaten

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah PDRB yang dinotasikan sebagai (y). maka:

$$D_{ij} = y^*_{ij} - y_{ij}$$

$$N_{ij} = y_{ij} \cdot r_n$$

$$M_{ij} = y_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan:

- y_{ij} : PDRB sektor i di daerah j (Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
 y^*_{ij} : PDRB sektor i di daerah j akhir tahun analisis
 (Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
 r_{ij} : laju pertumbuhan sektor i di daerah j (Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
 r_{in} : laju pertumbuhan sektor i di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan)
 r_n : rata-rata laju pertumbuhan tenaga kerja/GNP di daerah n
 (Provinsi Kalimantan Selatan)

$$r_{ij} = \frac{(y^*_{ij} - y_{ij})}{y_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{(y^*_{in} - y_{in})}{y_{in}}$$

$$r_n = \frac{(y^*_n - y_n)}{y_n}$$

Keterangan:

- y_{in} : GNP sektor i di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan)
 y^*_{in} : GNP sektor i di daerah n akhir tahun analisis (Provinsi Kalimantan Selatan)
 y_n : total GNP semua sektor di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan)
 y^*_n : total GNP semua sektor di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan) akhir tahun analisis

Untuk suatu daerah, pertumbuhan kabupaten, bauran industri dan keunggulan kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan daerah, sehingga persamaan shift share untuk sektor i di wilayah j adalah:

$$D_{ij} = y_{ij} \cdot r_n + y_{ij}(r_{in} - r_n) + y_{ij}(r_{ij} - r_{in})$$

Tabel 2.17. Shift Share Sektor Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2011-2015

No	Sektor/Industri	Komponen Pertumbuhan (Nij)	Komponen Bauran Industri (Mij)	Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij)	PDRB (Dij)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	78,319	313,276	22,148	413,744
2	Pertambangan dan Penggalian	(2,022)	(8,090)	146,385	136,273
3	Industri Pengolahan	26,854	107,418	1,819	136,091
4	Pengadaan Listrik dan Gas	486	1,943	(247)	2,182
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,332	5,328	(425)	6,235
6	Konstruksi	31,340	125,358	(5,002)	151,695
7	Perdagangan Besar dan Eceran	41,223	164,892	(35,358)	170,758
8	Transportasi dan Pergudangan	22,904	91,615	(23,111)	91,408

No	Sektor/Industri	Komponen Pertumbuhan (Nij)	Komponen Bauran Industri (Mij)	Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij)	PDRB (Dij)
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	13,372	53,486	3,590	70,448
10	Informasi dan Komunikasi	15,228	60,912	(2,405)	73,735
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,696	34,784	883	44,363
12	Real Estate	8,670	34,678	(97)	43,251
13	Jasa Perusahaan	525	2,101	(240)	2,386
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	37,794	151,177	2,808	191,779
15	Jasa Pendidikan	36,972	147,887	(10,843)	174,016
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,213	36,854	1,798	47,865
17	Jasa Lainnya	6,953	27,813	22,385	57,151
	Total	255,740	1,022,960	534,678	1,813,378

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. HSS 2017, Data diolah.

a) **Komponen Pertumbuhan (Nij)**

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 255.740 (juta rupiah. Namun, sebenarnya perkembangan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah sebesar 1.813.378 juta rupiah. Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh yaitu bauran industri dan keunggulan kompetitif.

Tiga penyumbang terbesar adalah sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (78.319 juta rupiah), Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (41.223 juta rupiah), dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (37.394 juta rupiah). Semua sektor menunjukkan pertumbuhan positif yang berarti pertumbuhan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih cepat dibandingkan PDRB Propinsi Kalimantan

Selatan kecuali sector pertambangan yang menunjukkan pertumbuhan yang negative berarti sector pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Selatan pada sector yang sama.

b) Komponen Bauran Industri (*Mij*)

Komponen bauran industri (*Mij*) menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah akibat adanya bauran industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu 1.022.960 juta rupiah. Nilai positif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif cepat.

Semua sector terkecuali sector pertambangan dan penggalian mendapat pengaruh bauran industri (nilai positif). Sektor-sektor tersebut mempunyai tingkat daya pertumbuhan cepat dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

c) Komponen Keunggulan Kompetitif (*Cij*)

Nilai keunggulan kompetitif yaitu 534,678 juta rupiah. Secara agregat nilai positif ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan mempengaruhi perkembangan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya Analisis Model Shift-Share Pendekatan Proportional Shift (PS) dan Differential Shift (DS) untuk menentukan skala tipologi pengembangan sector di Kabupaten Hulu Sungai Selatan disajikan pada table berikut.

Tabel 2.18. Analisis Model Shift-Share Pendekatan Proportional Shift (PS) dan Differential Shift (DS) Kab. Hulu Sungai Selatan

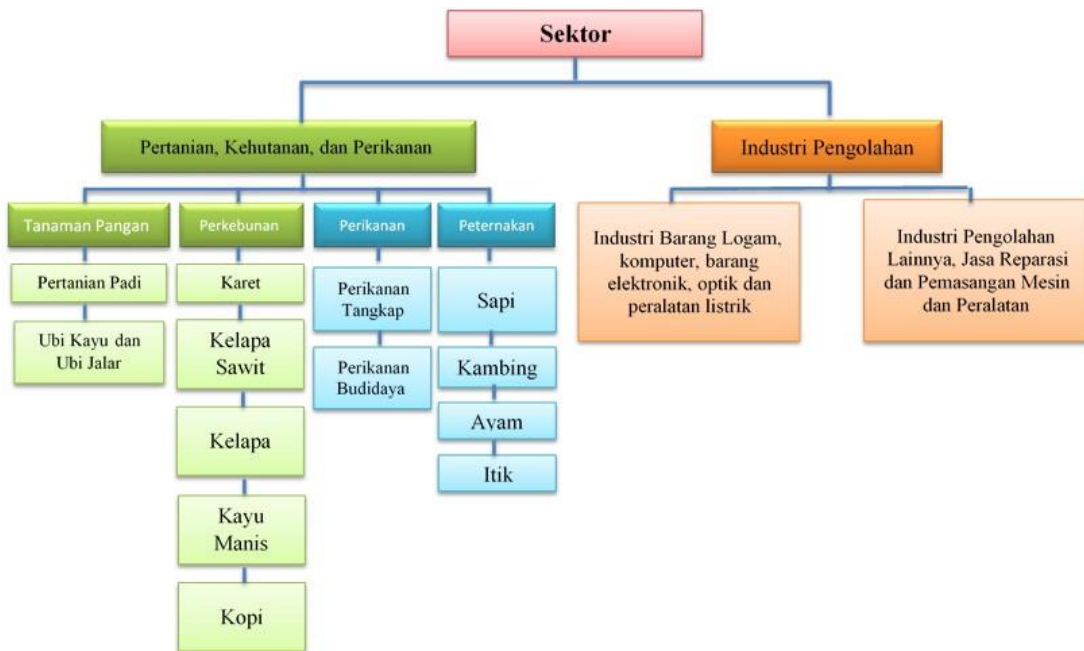
No	Sektor/Industri	DS (Cij)	PS (Mij)	Tipologi	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,148.31	313,276.19	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
2	Pertambangan dan Penggalian	146,385.21	(8,089.73)	III	Kecepatan Pertumbuhan Terhambat, Cenderung Berpotensi
3	Industri Pengolahan	1,818.53	107,417.67	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
4	Pengadaan Listrik dan Gas	(246.97)	1,942.78	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	(424.52)	5,327.54	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
6	Konstruksi	(5,002.49)	125,358.11	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
7	Perdagangan Besar dan Eceran	(35,357.79)	164,892.43	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
8	Transportasi dan Pergudangan	(23,110.70)	91,615.13	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	3,589.85	53,486.37	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
10	Informasi dan Komunikasi	(2,404.91)	60,911.94	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	883.03	34,783.90	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
12	Real Estate	(97.04)	34,678.16	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
13	Jasa Perusahaan	(240.17)	2,101.16	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	2,807.76	151,177.34	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
15	Jasa Pendidikan	(10,843.01)	147,887.19	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,797.61	36,853.55	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
17	Jasa Lainnya	22,384.58	27,813.00	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
TOTAL		534,678.27	1,022,959.94	I	Pertumbuhan Sangat Pesat

Sumber: BPS Kab. HSS (diolah) 2016

Berdasarkan data diatas secara keseluruhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk pada tipologi I yaitu Pertumbuhan sangat pesat. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah. Keunggulan komparatif bagi suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang secara perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Sedangkan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

2.3.3. Summary Analisis Sektoral

Berdasarkan hasil identifikasi list komoditas unggulan, berikut di bawah ini list komoditas industri unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 2.3. Long List Komoditas Industri Unggulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan beberapa metode dan kriteria, juga berdasarkan hasil kesepakatan *Focus Group Discussion* (FGD) maka berikut ini komoditas unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

1. Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan
2. Industri Pengolahan Hasil Perikanan
3. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
4. Industri Pengolahan Peternakan
5. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
6. Industri Barang Logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik

2.4. Infrastruktur Dasar dan Penataan Wilayah

2.4.1. Infrastruktur Jalan Darat

Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi kedalam tiga status yaitu Jalan Negara yang pengelolaannya dibawah Pemerintah Pusat, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Selanjutnya Kondisi jalan kabupaten menurut kecamatan disajikan pada table berikut.

Tabel 2.19. Infrastruktur Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Kondisi Jalan (Km)				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Padang Batung	46.02	14	29.8	2	91.82
2	Loksadi	23.6	25.25	43.6	61.5	153.95
3	Telaga Langsung	21.95	5	8.5	3	38.45
4	Angkinang	41.48	14.97	15.7	9.8	81.95
5	Kandangan	67.46	9.59	11.25	9.38	97.68
6	Sungai Raya	68.02	12.9	17.65	5.5	104.07
7	Simpur	39.68	15.45	19.9	1.4	76.43
8	Kalumpang	11.97	17.5	29.25	21.5	80.22
9	Daha Selatan	19.98	5.15	15.8	5	45.93
10	Daha Barat	2.5	9.5	19.5	8.3	39.8
11	Daha Utara	16.21	11.95	8.71	3.4	40.27
Hulu Sungai Selatan		358.87	141.26	219.66	130.78	850.57

Sumber: Dinas PU Kab. Hulu Sungai Selatan, 2016

Berdasarkan data diatas, kondisi baik kategori baik untuk status jalan kabupaten yaitu 358,87 Km, kondisi jalan sedang yaitu 141,26 Km, rusak 219,66 Km dan kondisi jalan rusak berat mencapai 130,78 Km.

2.4.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sistem tata ruang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi menjadi 6 Sub Satuan Wilayah Pembangunan. Masing-masing pusat SSWP akan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

- 1. SSWP (Sub Satuan Wilayah Pembangunan) I** yang meliputi Kecamatan Kandangan, Angkinang, Simpur, Sungai Raya dan sebagian Telaga Langsung. Dengan Kota Kandangan sebagai pusatnya.

- ❑ Fungsi Kegiatan : Jasa Pemerintahan umum skala regional, Perdagangan skala regional dan lokal, Pertanian , Perkebunan, Peternakan, Pertambangan, Kawasan Militer, Industri non polutan dan pergudangan, Jasa Transportasi angkutan darat)
- ❑ Arahan Pengembangan SSWP I :
 - ⊕ SSWP ini berperan sebagai pusat pertumbuhan skala regional dengan skala pelayanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terutama pada sektor Perdagangan , Jasa pemerintahan umum dan kegiatan transportasi darat
 - ⊕ Pengembangan kawasan perkotaan dikonsentrasikan pada wilayah Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan core wilayah 18 Kelurahan didalam Kecamatan Kandangan yaitu : Kelurahan Jambu Hilir, Tibung Raya, Amawang Kanan, Sungai Paring, Amawang kiri, Bariang, Amawang Kiri Muka, Kandangan Barat, Kandangan Kota, Kandangan Utara, Gambah Luar Muka, Gambah Luar, Gambah Dalam, Gambah Dalam Barat, Lungau, Sungai Kupang, Bangkau dan Baluti.
 - ⊕ Pengembangan kawasan hinterland kota dengan berbasis pada sektor ekonomi basis di tiap Kecamatan
 - ⊕ Pengembangan linkage system kota dengan berbasis pada konsep interaksi kota yang menghubungkan interaksi kota primat di Kota Kandangan dengan kota-kota satelitnya
 - ⊕ Pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengarahkan satuan wilayah ini menjadi protatipe Pengembangan Wilayah Perkotaan sesuai dengan visi misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - ⊕ Pengembangan Kawasan Interchange Jalan Ruas Utama Trans Kalimantan sebagai Kawasan perdagangan dan jasa skala lokal
 - ⊕ Pengembangan koridor jalan arteri primer yang menjadi akses utama yaitu Trans Kalimantan antar kabupaten di Kalimantan dalam tujuan mengoptimalkan fungsinya sebagai sarana kegiatan ekonomi antara wilayah ini.

- ✿ Pengembangan kawasan Militer
- ✿ SSWP I memiliki peranan sebagai wilayah pengembangan pada bagian tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pusat pada Kota Kandangan.

2. **SSWP (Sub Satuan Wilayah Pembangunan) II** yang meliputi Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat dan Kalumpang. Dengan Kota Daha Selatan sebagai pusat pertumbuhan.

- ❑ Fungsi Kegiatan : Industri dan pergudangan skala regional, Perdagangan skala regional dan lokal, Pertanian, perikanan, Peternakan, Perkebunan, Rawa, Pariwisata Lokal, Jasa Transportasi angkutan sungai.
- ❑ Arah Pengembangan SSWP II :
 - ✿ SSWP II memiliki Peran sebagai Kutub perkembangan wilayah Kabupaten HSS bagian selatan dengan akan direncanakannya kawasan pelayanan skala regional yang berada dalam lokasi ini
 - ✿ Pengembangan kawasan pelabuhan sungai yang melayani kegiatan perangkutan regional dalam jasa pengembangan ekonomi daerah sungai. Kawasan ini akan menjadi salah satu magnet perkembangan wilayah kabupaten HSS Bagian Selatan
 - ✿ Pengembangan linkage system kota dengan berbasis pada konsep interaksi kota yang menghubungkan interaksi kota primat di Kawasan Negara dengan wilayah satelitnya
 - ✿ Pengembangan kawasan industri yang melayani dan meningkatkan produk industri untuk skala lokal dan regional
 - ✿ Pengembangan kawasan Negara sebagai sentra kegiatan utama di kawasan ini sebagai titik aglomerasi kegiatan agraris dari wilayah satelitnya
 - ✿ Optimalisasi sumber daya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Negara yang menjadi resources utama bagi kegiatan agraris di SSWP ini
 - ✿ Pengembangan koridor jalan arteri primer yang menjadi akses utama dari kota Kandangan menuju Kawasan Negara

- ✿ SSWP II memiliki peranan sebagai wilayah pengembangan pada bagian barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pusat pada Kecamatan Daha Selatan
- ✿ Pada kawasan ini khususnya pada pada Kecamatan Daha Barat pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Babirik penggunaan fungsi lahannya cenderung sama sebagai lahan Hutan Produksi Konversi sesuai dengan KepMen 453 tentang peruntukan Hutan dan Pengairan.

3. **SSWP (Sub Satuan Wilayah Pembangunan) III** yang meliputi Kecamatan Loksado, Padang Batung, sebagian Telaga Langsung dan sebagian Kecamatan Sungai Raya. Dengan Kota Loksado (kawasan Pariwisata) sebagai pusat pertumbuhan.

- ❑ Fungsi Kegiatan : Pariwisata skala regional dan Nasional, Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Industri dengan skala lokal.
- ❑ Arahan Pengembangan SSWP III :
 - ✿ SSWP III memiliki Peran sebagai Kutub perkembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bagian Timur dengan akan direncanakanya kawasan pelayanan skala regional yang berada dalam lokasi ini
 - ✿ SSWP III memiliki peranan sebagai wilayah pengembangan Kawasan wisata andalan untuk skup regional dan Nasional
 - ✿ Pendulang utama pendapatan yang mendukung dari segi multi flier`effect
 - ✿ Pengembangan Pelestarian Hutan menjadi prioritas utama pada kutup perkembangan yang ada pada satuan wilayah ini karena Kecamatan Loksado memiliki kawasan Hutan Lindung yang dilindungi oleh undang-undang
 - ✿ Pengembangan koridor jalan arteri primer yang menjadi akses utama antar kabupaten yaitu Batu Licin – Kandangan yang melewati akses jalan Loksado

- ✿ Optimalisasi sumber daya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Amandit yang menjadi resources utama bagi kegiatan agraris di SSWP ini
- ✿ Pengembangan koridor kawasan perbatasan HSS – Tanah Bumbu yang tentunya membutuhkan pengelolaan kegiatan koordinatif dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dalam pengentasan bacward region (kawasan Tertinggal) yang terdapat di beberapa lokasi di SSWP ini terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih dan sarana utilitas lainnya
- ✿ SSWP III memiliki peranan sebagai wilayah pengembangan pada bagian tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pusat pada Kecamatan Loksado.

Tabel. 2.20. Fungsi Dan tujuan SSWP Kabupaten Hulu Sungai Selatan

SSWP	Kecamatan	Fungsi Dan Tujuan														
		1	2	3	4	5	6	7								
								a	b	c	d	e	f			
SSWP I	Kandangan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sungai Raya	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Telaga Langsat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Simpur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Angkinang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SSWP II	Daha Selatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Daha Utara	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Daha Barat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Kalumpang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SSWP III	Laksado	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Padang Batung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Keterangan :

■	: Pusat Skala Kabupaten
■	: Pusat Skala Kecamatan
1	: Kegiatan Pelayanan Masyarakat (Public Service)
2	: Kegiatan Pemasaran Dan Perdagangan
3	: Kegiatan Pendidikan
4	: Kegiatan Jasa Perhubungan Dan Transportasi
5	: Kegiatan Wisata Dan Rekreasi
6	: Kegiatan Kehutanan
7	: Kegiatan Ekonomi
7a	: Pertanian
7b	: Perkebunan
7c	: Perikanan
7d	: Peternakan
7e	: Perdagangan Dan Jasa
7f	: Industri

Kawasan sentra industri yang dianggap sangat produktif dan merupakan basis sektor/subsektor/program yang dapat mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan daerah sesuai potensi sumber daya dan ekosistemnya. Kawasan-kawasan tersebut adalah sentra-sentra industri kecil, menengah dan sentra kerajinan.

Konsep kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kawasan sentra industri didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi tertentu, dimana kegiatan ekonominya, sektor dan produk unggulannya, mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini membentuk suatu kluster. Kawasan tersebut dapat berupa kluster industri, tergantung dari kegiatan ekonomi yang dominan dalam kawasan itu.

Tujuan Rencana Pembangunan industri kabupaten adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (economic system), masyarakat (social system), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (ecosystem) serta program pemerintah daerah pendukung penguatan system industri. Setiap sistem ini memiliki tujuannya masing-masing. Secara umum, tujuan dari pengembangan sentra-sentra industri ini yaitu sebagai berikut:

1. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung;
2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar wilayah;
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan konservasi sumberdaya alam demi kesinambungan pembangunan daerah.
6. Mendorong pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan.

Pengembangan sentra-sentra industri dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi, yaitu:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah.
3. Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing global.
4. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah.
5. Mempercepat pembangunan industri dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak.
6. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Selain tujuan-tujuan tersebut diatas, dari segi kepentingan daerah, pengembangan sentra industri dapat diarahkan untuk mencapai hal berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan mutu, produktivitas dan daya saing.
3. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

Kriteria sentra-sentra industri yang berhasil antara lain adalah:

1. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah;
2. Mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam sentra itu sendiri maupun di sentra industry sekitarnya;
3. Memiliki keterkaitan kedepan (daerah memiliki pemasaran produk-produk yang dihasilkan) maupun ke belakang (mendapat suplai kebutuhan komponen produksinya dari daerah belakang) dengan beberapa daerah pendukung.
4. Memiliki kemampuan untuk memelihara SDA sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

2.4.3. Potensi hambatan dan masalah dalam pembangunan industri

Potensi hambatan dan masalah dalam pelaksanaan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didasarkan pada pembahasan secara umum, serta berdasarkan hasil FGD dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, dapat dikemukakan beberapa permasalahan, yakni permodalan, produksi, dan pengelolaan usaha, dan pemasaran yang diuraikan sebagai berikut:

1). Permodalan

Permodalan yang dibutuhkan tergantung kebutuhan biaya produksi dari masing-masing jenis usaha industri dan kerajinan yang dikelola, umumnya mereka memiliki modal hanya mampu untuk beberapa kali produksi dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian kondisi membuat kurangnya persediaan baik bahan baku maupun barang jadi untuk memenuhi permintaan yang meningkat.

2). Produksi

Sistem dan teknologi proses produksi yang diterapkan para perajin umumnya masih tradisional dan manual dengan peralatan sederhana sehingga jumlah, kualitas dan desain produk yang dihasilkan masih terbatas khususnya pada industri kerajinan dimana sistem dan proses produksi yang ada cenderung masih mereka pertahankan karena telah menjadi kebiasaan, disamping tidak menguasai teknologi proses produksi yang maju dan berkembang serta tidak mampu menyediakan mesin dan peralatan produksi yang lebih baik karena terkendala aspek biaya.

3). Pengelolaan Usaha

Pengelolaan usaha dilakukan dengan seadanya belum mampu menguasai dan menerapkan manajemen meskipun secara sederhana, hal ini terkait dengan tingkat SDM mereka, begitu pula semangat kewirausahaan, inovasi dan kreativitas yang dimiliki masih terbatas sehingga masih perlu pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu dari berbagai pihak untuk meningkatkan pengembangan usahanya.

Selain itu secara umum industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum terpenuhi hak paten industri sehingga rawan untuk dilakukan plagiat pada daerah lain bahkan negara lain. Kelemahan dalam Hak Paten dipengaruhi oleh kebijakan nasional dimana saat ini secara nasional baru terbentuk 50 sentral HKI se Indonesia dan termasuk Sentral HKI yang terbentuk di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa faktor yang ikut berpengaruh pada rendahnya patent industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- 1) Kesadaran masyarakat (motivasi)
- 2) Sentral HKI baru terbentuk
- 3) Birokrasi pematenan
- 4) Biaya patent
- 5) Pemahaman akan pentingnya patent

Dengan demikian diperlukan kerjasama dalam bidang Hak Paten pada seluruh industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat yang baru terbentuk pada tahun 2013 atau melalui Kementerian Hukum dan HAM di daerah dalam rangka menyelamatkan aset industri daerah.

4). Pemasaran

Pemasaran produk sebagian besar masih terbatas pada pasar lokal dan antar pulau antara lain propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Bali dan sebagian kecil kepulauan Jawa, sedangkan untuk pasar ekspor hanya dalam skala kecil melalui pengusaha di Banjarmasin disamping sebagai barang bawaan. Untuk meningkatkan pemasaran tersebut masih terdapat kendala yaitu lemahnya daya saing terutama kualitas, desain dan harga.

BAB III

VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3.1.1. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi industri daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ingin dicapai. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para *stakeholders* dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan industri daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan industry daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Arahan Tahapan Ketiga RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 - 2025

Arahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tercakup dalam tahapan ketiga menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) tahun 2005- 2025 adalah sebagai berikut:

- Terbangunnya sumberdaya manusia yang religius yang mengamalkan ajaran agama sebagai bentuk sikap religius masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pembangunan SDM yang demikian mulai dilakukan

melalui upaya menanamkan sikap religius sejak usia dini sampai remaja sebagai upaya membangun generasi muda yang cerdas dan berbudi luhur termasuk untuk senantiasa bersikap jujur.

- Mendorong adanya peningkatan kesalehan dan kepedulian sosial ummat yang difasilitasi melalui kelembagaan zakat, infaq dan sedekah yang dikelola secara profesional untuk perbaikan ekonomi ummat serta peningkatan pembiayaan berbasis syariah untuk mendorong kegiatan perekonomian.
- Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama terus dilakukan termasuk pengembangan sarana peribadatan utama dan kelembagaan di tiap Kecamatan. Peningkatan kualitas pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; Peningkatan kualitas pengelolaan serta pengembangan fasilitas untuk pelaksanaan ibadah, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku; serta upaya pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan generasi yang ber moral dan ber etika.
- Peningkatan peran serta pemuda, pengembangan peran wanita dalam pembangunan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pembinaan kelembagaan sosial di masyarakat.
- Semakin mantapnya profesionalisme aparatur pemerintahan, efisiensi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di daerah sehingga makin mengoptimalkan pelayanan publik.

- Terlaksananya pemenuhan dan pemerataan serta peningkatan pelayanan dasar yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat yang salah satu tolok ukur utamanya adalah meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) melalui (a) peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan termasuk meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal dan non formal; (b) meningkatnya derajat kesehatan dan menurunnya angka kesakitan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan termasuk jaminan memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
- Semakin menurunnya jumlah keluarga miskin yang dicapai melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya terpadu dan berkesinambungan.
- Terwujudnya Rumah Sakit Hassan Basry sebagai pusat rujukan di wilayah Benua Anam.
- Terbangunnya sumberdaya manusia yang religius dan berbudaya yang memiliki karakter dan identitas diri berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat; musyawarah dan rakat mufakat dengan tidak menghilangkan sikap kritis dan demokratis serta mewarisi semangat dan nilai kejujuran sehingga mampu mendorong terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.
- Menurunnya pengangguran terdidik dengan makin meningkatnya minat serta kemampuan generasi muda ber wirausaha. Untuk itu perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan; pemberian keahlian

kecakapan hidup maupun pemberian pelatihan kerja serta kegiatan magang terhadap kalangan generasi muda.

- Peningkatan produksi pangan dan hortikultura dengan didukung oleh optimalisasi waduk Amandit dengan jaringan irigasinya sehingga selain Hulu Sungai Selatan tetap menjadi daerah surplus padi dan sentra hortikultura juga terjadi peningkatan produksi perikanan, perkebunan dan peternakan.
- Optimalisasi waduk Amandit untuk tanaman pangan; perikanan; dan pariwisata.
- Peningkatan produksi sektor perkebunan dengan segenap *multiplier* efeknya guna mampu menjadi salah satu sumber penyerapan tenaga kerja serta sumber pembiayaan pembangunan melalui komoditas utamanya berupa kelapa sawit dan karet
- Memantapkan Kota Kandangan sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di wilayah Banua Anam
- Terpeliharanya fungsi resapan kawasan rawa dan keanekaragaman hayati. dan juga terpeliharanya nilai ekonomis kawasan rawa di daerah bawah.
- Makin meningkatnya produksi, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian (pangan; perkebunan, peternakan, dan perikanan) melalui optimalisasi sub sektor agro-industri sebagai sektor sekunder yang didukung pula oleh sektor tersier. Peningkatan nilai tambah ini tetap memperhatikan aspek permintaan pasar dan daya saing yang didukung oleh pengembangan industri kecil dan koperasi yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar.

Kaitan dengan hal ini juga adalah peningkatan fasilitasi akses permodalan terutama yang berbasis syariah bagi pelaku perekonomian di daerah.

- Peningkatan perkembangan pusat kawasan agropolitan yang meliputi pusat kawasan agropolitan dataran koridor Kandangan; pusat kawasan agropolitan dataran koridor Angkinang; pusat kawasan agropolitan koridor pegunungan termasuk waduk Amandit dan pusat kawasan agropolitan kawasan sungai dan rawa yang ditandai dengan peningkatan produksi komoditas unggulan; peningkatan fasilitas penunjang kawasan; peningkatan perolehan nilai tambah dengan tetap berorientasi pada pasar.
- Konsep petik – olah – jual telah diterapkan dan optimalisasi sistem agribisnis yang mencakup hulu sampai hilir
- Mulai terbentuknya daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah agropolitan yang ditandai dengan berkembangnya perekonomian masyarakat karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis oleh masyarakat sebagai pelaku utama termasuk juga kegiatan jasa dan perdagangannya. Selain itu masing-masing pusat kawasan agropolitan sudah mampu mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) kawasan *hinterland* dan desa-desa wilayah sekitarnya; serta ditandai pula dengan peningkatan pertumbuhan PDRB secara signifikan bagi sektor-sektor yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan sektor pertanian.
- Peningkatan daya saing koperasi dan industri mikro kecil melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan

kemitraan, peningkatan produktivitas yang ditunjang oleh upaya adaptasi terhadap kebutuhan pasar.

- Makin meluasnya penyediaan jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian serta jaringan komunikasi untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah.
- Sebagian besar masyarakat telah menikmati listrik dan lebih dari 50 % rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah dapat terlayani oleh PDAM secara berkualitas.
- Meningkatnya dan laju pertumbuhan ekonomi disertai dengan penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya investasi.
- Tertatanya penunjang perkembangan ekonomi berupa regulasi, pengembangan sumberdaya manusia, penyediaan teknologi tepat guna, dan penataan jaringan distribusi.
- Terbangunnya dan terpeliharanya infrastruktur daerah yang ditandai dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi, peningkatan penyediaan air bersih perpipaan, peningkatan dan pemanfaatan sumber-sumber air baku, peningkatan pengembangan perumahan dan permukiman, pemenuhan energi, pengendalian banjir dan faktor penyebabnya.
- Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di kabupaten dan kecamatan yang utamanya ditandai dengan semakin lengkapnya dokter spesialis serta tersedianya rawat inap pada puskesmas di Ibukota Kecamatan.
- Terlaksananya peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas pemerintah

daerah sesuai dengan kewenangan dan fungsi pemerintah daerah; peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan kedinasan, kapasitas lembaga eksekutif dan legislatif, kinerja pengelolaan administrasi pemerintah daerah.

- Terselenggaranya demokrasi yang sehat dalam kehidupan politik melalui kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap sistem demokrasi itu sendiri; terselenggaranya kehidupan politik yang berlandaskan pada azas saling menghargai terhadap keragaman pilihan politik masyarakat; terlaksananya pemilu legislatif 2014, pemilihan kepala negara 2014, pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2015, dan pemilihan bupati dan wakil bupati 2018.
- Terselenggaranya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial di masyarakat.
- Terkendalinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan khususnya lingkungan sumberdaya hayati.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah, Rancangan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mempertimbangkan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta visi industry Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Maka visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu:

“Industri yang Maju, Mandiri dan Terintegrasi Berbasis Sumber Daya Lokal”

Tabel 3.1. Perumusan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Indikator
<i>“Industri yang Maju, Mandiri dan Terintegrasi Berbasis Sumber Daya Lokal”</i>	Mandiri, Unggul dan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya peran sektor industri memacu pertumbuhan ekonomi daerah. ▪ Meningkatnya pembangunan didukung investasi industri daerah.
	Berbasis Sumber Daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan industri daerah sesuai potensi lokal ▪ Tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat

Keterkaitan visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan visi Nasional dan visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: **Industri yang Maju, Mandiri dan Terintegrasi Berbasis Sumber Daya Lokal**, memiliki peran terhadap perwujudan visi Nasional Tahun, yaitu : **Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh**, serta visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: **“Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Daerah pada Tahun 2035”** sebagai mana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 3.2. Keterkaitan Visi Pembangunan Industri Nasional, Provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Visi Nasional	Visi Provinsi Kalimantan Selatan	Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh	Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Daerah pada Tahun 2035	Industri yang Maju, Mandiri dan Terintegrasi Berbasis Sumber Daya Lokal

3.1.2. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan industri berbasis sumber daya alam lokal.
2. Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri kreatif serta industri besar secara terintegrasi.
3. Peningkatan sistem distribusi yang efektif dan efisien.
4. Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing

Tabel 3.3. Sinkronisasi Rancangan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Misi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Nasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
1.	Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional	Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri	Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri
2.	Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional	Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan	Pengembangan dan pengelolaan industri berbasis sumber daya alam lokal
3.	Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau	Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk	Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri kreatif serta

No	Nasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah	industri besar secara terintegrasi.
4.	Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat		Peningkatan sistem distribusi yang efektif dan efisien
5.	Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
6.	Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional		
7.	Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan		

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Hulu Sungai Selatan adalah:

1. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, output, serta nilai tambah yang dihasilkan.

2. Terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan dengan industri besar. Hal tersebut juga ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang, komponen dan bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi.
3. Meningkatnya jumlah industri yang berbasis pada hasil karya intelektual yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge-based) yang ditandai dengan meluasnya penggunaan teknologi informasi yang dapat mendinamisasi bisnis, serta tumbuhnya industri kecil menengah.
4. Meningkatnya persebaran IKM yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, penggairahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial.
5. Meningkatnya ekspor produk IKM, baik dalam nilai, dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser ke arah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi.

3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dicapai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2037 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2020 - 2035**

No	Sasaran	Baseline 2015	Tahun			
			2020	2025	2030	2035
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	11,95	12,05	12,43	13,35	14,32

2	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	7,80	8,41	9,82	11,45	13,25
3	Nilai produksi industri (Rp ribu)	100.161.350	106.305.843	112.455.768	122.353.843	135.549.850
4	Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)	25.138	28.572	32.853	37.815	42.875

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara 5% (sampai dengan 5,5 % per tahun);
2. Inflasi 4,5% sampai dengan 5,5%
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan

7. Koordinasi antar kementerian/lembaga/dinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 – 2037 tersebut dibutuhkan :

1. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) antara provinsi dan kabupaten/kota;
2. Komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masyarakat dan pelaku dunia usaha melalui kepemimpinan Bupati, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*);
3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

3.4. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap I (2017-2022)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan sektor hulu industri berbasis potensi wilayah yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2022-2027)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai perekonomian daerah yang berdaya saing melalui pembangunan industry hilir berbasis potensi wilayah yang didukung penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta peningkatan SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2027-2032)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan sector industry unggulan melalui sistem inovasi daerah dan teknologi.

4. Tahap IV (2032-2037)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan sektor industry di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Maju,

Mandiri dan terintegrasi Berbasis Sumber Daya Lokal, serta berbasis inovasi dan teknologi.